

EKSISTENSI PRINSIP “DIKUASAI OLEH NEGARA” DALAM *POWER PURCHASE AGREEMENT* PROYEK *INDEPENDENT POWER PRODUCER* DENGAN SKEMA *BUILD, OWN, OPERATE AND TRANSFER (BOOT)* DI PT PLN (PERSERO)

INTISARI

Oleh

Endhika Dollar Sanggragiri¹, Sulistiowati²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana eksistensi prinsip “dikuasai oleh negara” dalam *Power Purchase Agreement* (PPA) proyek *Independent Power Producer* (IPP) yang menggunakan skema *Build, Own, Operate and Transfer* (BOOT) di PT PLN (Persero) saat ini serta untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam penerapan skema BOOT pada PPA proyek IPP di PT PLN (Persero) dan bagaimana penyelesaiannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan dituangkan secara deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Adapun pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif setelah itu dikaitkan dan dijelaskan secara sistematis dan kemudian disimpulkan sehingga menjadi data yang konkrit dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa prinsip “dikuasai oleh negara” yang mencakup fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dan fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*) saat ini masih ada/eksis dalam PPA proyek IPP yang menggunakan skema BOOT di PLN. Beberapa kendala terkait penerapan skema BOOT pada PPA di PT PLN (Persero) antara lain terkait dengan pembebasan lahan, pendanaan proyek, jangka waktu perjanjian yang relatif panjang sampai dengan tahapan pengalihan (*transfer*), dan belum adanya ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai skema BOOT di Indonesia.

Kata Kunci: Prinsip dikuasai oleh negara, *Power Purchase Agreement*, *Build Own Operate and Transfer* (BOOT)

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Kampus Jakarta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Magister Ilmu Hukum, Kampus Jakarta Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

EXISTENCE OF PRINCIPLE "CONTROLLED BY THE STATE" IN THE POWER PURCHASE AGREEMENT OF INDEPENDENT POWER PRODUCER PROJECT WITH BUILD, OWN, OPERATE AND TRANSFER (BOOT) SCHEME IN PT PLN (PERSERO)

ABSTRACT

By:

Endhika Dollar Sanggragiri¹, Sulistiowati²

This research is purposed to know and analyze how the existence of the principle of "controlled by the state" in the Power Purchase Agreement of Independent Power Producer project that uses the Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) scheme at PT PLN (Persero) at this time and to know and analyze constraints in implementing the BOOT scheme on PPA's IPP project at PT PLN (Persero) and how to solve it.

This research is a normative empiric and poured out descriptively. The data used in this research are primary data and secondary data. Primary data is obtained through field research by means of interviews. Meanwhile, secondary data was obtained from literature research. The processing and analysis of the data used is descriptive qualitative and then it is associated and explained systematically and then concluded, so that it becomes concrete data and can be scientifically accountable.

From the analysis carried out it can be concluded that the principle of "controlled by the state" which includes management functions (beheersdaad) and supervisory functions (toezichthoudensdaad) currently exists in the PPA of IPP project that uses the BOOT scheme at PT PLN (Persero). Some constraints related to the implementation of the BOOT scheme at PPA at PT PLN (Persero), inter alia, are related to land acquisition, project funding, the term of the agreement which is relatively long up to the transfer phase, and the absence of provisions or legislation governing the BOOT scheme in Indonesia.

Key Word: *Principle of controlled by the state, Power Purchase Agreement, Build Own Operate and Transfer (BOOT)*

¹ Student of Master of Law, Jakarta College Faculty of Law of Gadjah Mada University

² Lecturer of Master of Law, Jakarta College Faculty of Law of Gadjah Mada University